

**PERAN KPU KOTA BATU DALAM PROSES VERIFIKASI ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu)**

Diana Fitri Salsabila¹

Universitas Islam Malang
Jl. Mayjend Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Jawa Timur 65144
Dianafitri430@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses and examines several things related to the Role of the Batu City General Election Commission in Verifying the Administration of Political Parties as Candidates for the 2024 General Election, including the Role of the City KPU in the process of Verifying the Administration of Political Parties as Candidates for the 2024 General Election. Researchers in this research used a type of Empirical Juridical Research, using a sociological juridical approach. The location of this research is the Batu City KPU Office. This research uses two primary data sources and secondary data sources. The research results show that the role of the Batu City KPU in carrying out the administrative verification stages of political parties participating in the 2024 Election is in accordance with the five principles of democracy. The role of the Batu City KPU in administrative verification ensures that elections are carried out with a high level of democracy, in accordance with democratic principles. At the Political Party Verification stage, the Batu City KPU provides equal treatment to all participants in the 2024 Election and ensures that voters are free from fraud or unfair treatment from any party. The role of the Batu City KPU as an election organizing institution as well as implementing the administrative verification stages of political parties participating in the 2024 Election.

Key words : General Election Commission, Administrative Verification, Political Parties

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang beberapa hal yang terkait dengan Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, diantaranya Peran KPU Kota dalam proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Penelitian ini menggunakan dua data Primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran KPU Kota Batu dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan lima prinsip demokrasi. Peran KPU Kota Batu dalam verifikasi administrasi memastikan jalannya Pemilu dengan tingkat demokrasi yang tinggi, sesuai dengan prinsi-prinsip demokrasi. Dalam tahap Verifikasi Partai Politik KPU Kota Batu memberikan perlakuan yang sama dengan kepada semua peserta Pemilu Tahun 2024 dan pemilih memastikan kebebasan dari kecurangan atau perlakuan tidak adil dari pihak manapun. Peran KPU Kota Batu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu serta pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

¹ Mahasiswa FH Unisma

Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Verifikasi Administrasi, Partai Politik

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem yang meyakini konstruksi atau mekanisme sistem pemerintahan dengan melaksanakan kedaulatan rakyat di atas kepentingan negara yang bertujuan dilaksanakan pemerintah negara tersebut. Prinsip ini berakar pada pandangan Aristoteles yang menekankan pentingnya kebebasan untuk memastikan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Demokrasi tidak hanya menjadi fondasi perlindungan kedaulatan rakyat, tetapi juga mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana penting dalam pergantian kepemimpinan.

Pemilu di Indonesia diatur oleh Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Partai politik sebagai jembatan dalam percalonan pemilu. Partai politik diwajibkan untuk mengikuti prosedur pendaftaran dan verifikasi yang ditetapkan oleh KPU. KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, memiliki tugas untuk melakukan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Proses verifikasi ini mencakup pemeriksaan dokumen persyaratan seperti kepengurusan, AD/ART, dan dokumen lainnya. Verifikasi dilakukan di semua tingkatan pemerintahan secara mandiri oleh KPU, tanpa intervensi pihak luar.

KPU memiliki perturan yang biasanya disebut PKPU. PKPU sendiri merupakan aturan turunan dan peraturan teknis untuk menyelenggarakan pemilihan umum di bawah UU. Sehingga memiliki peranan yang sangat penting bagi terselenggaranya pemilu. PKPU sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang telah memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana peran KPU Kota Batu dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan apa kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU Kota Batu dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk mengetahui kendala dalam proses verifikasi administrasi tersebut. Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat

teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang latar belakang, tujuan, dan implikasi verifikasi administrasi dalam proses Pemilu. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai isu-isu hukum Pemilu dan pedoman bagi calon legislatif serta partai politik, serta memperkaya pemahaman tentang metode pelaksanaan verifikasi partai politik dan calon legislatif bagi berbagai kalangan.

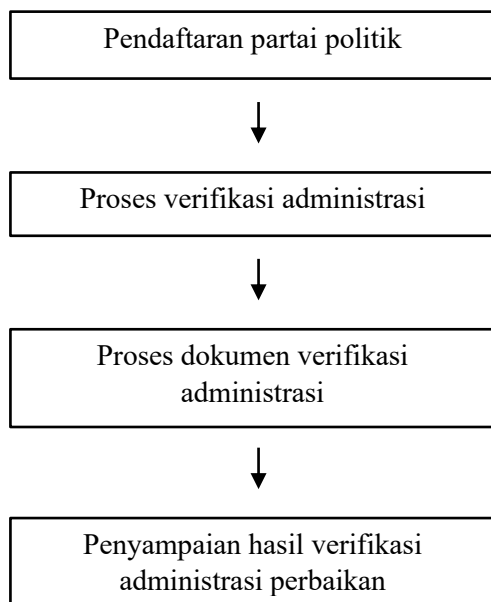
PEMBAHASAN

a. Peran KPU Kota Batu dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Penelitian ini membahas peran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Berikut merupakan peran KPU Kota Batu dalam Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 menuju Pemilu yang Demokratis.

Gambar 1

Flowchart Tahapan Verifikasi



Langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Batu termasuk sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, penggunaan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) untuk efisiensi proses pendaftaran, serta penyediaan layanan helpdesk untuk mendukung partai politik dalam menghadapi kendala teknis.

Penelitian ini membandingkan proses verifikasi administrasi partai politik pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, dengan penekanan pada perubahan yang terjadi, terutama peralihan dari verifikasi secara offline pada 2014 ke penggunaan aplikasi SIPOL pada 2019 dan 2024. Pada Pemilu 2024, terdapat kebijakan yang lebih fleksibel di mana partai politik yang telah memiliki kursi di DPR RI tidak diwajibkan mengikuti verifikasi faktual, berbeda dengan partai baru yang harus menjalani kedua jenis verifikasi, yaitu administrasi dan faktual.

Hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kota Batu menunjukkan bahwa dari 23 partai yang mendaftar, 22 lolos tahap pendaftaran, sedangkan satu partai tidak memenuhi syarat. KPU Kota Batu berperan aktif dalam memfasilitasi partai politik untuk melengkapi dokumen persyaratan serta memberikan bantuan teknis melalui helpdesk, memastikan proses verifikasi berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Bedasarkan hal tersebut KPU Kota Batu telah menjalankan perannya dengan efektif dalam memastikan bahwa proses verifikasi administrasi partai politik berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sehingga mendukung terciptanya Pemilu 2024 yang demokratis.

b. Kendala pada saat Verifikasi Administrasi Partai Politik

KPU Kota Batu melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam verifikasi administrasi tersebut terdapat kendala diantaranya kesulitan membuktikan kebenaran dan keabsahan dokumen lama yang diunggah di aplikasi SIPOL dikarenakan dokumen tersebut tidak terbaca jelas, selain itu penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tidak mudah dimengerti oleh anggota partai politik, yang mana anggota partai politik sering berganti sehingga menjadi salah satu penghambat proses Verifikasi Administrasi. Dalam pelaksanaan verifikasi persyaratan administrasi dokumen persyaratan Partai Politik KPU telah berupaya mewujudkan aspek transparansi dengan melakukan uji publik, yakni dengan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap kepada masyarakat. Sayangnya Jangka waktu pengumuman DCS yang ditetapkan oleh KPU sangat tidak efektif. Di lain pihak, jumlah bakal calon yang diumumkan dalam DCS sangatlah banyak. Informasi tentang Caleg yang diunggah oleh KPU melalui SILON (Sistem Informasi Calon) juga masih terkesan “formalitas” karena hanya berupa Daftar Riwayat hidup (*Curriculum Vitae*) saja, dan itupun hanya dapat diakses oleh kalangan masyarakat tertentu (karena membutuhkan jaringan internet) sehingga kurang eketif.

Menurut Analisa peneliti, untuk lebih mengefektifkan Tahapan Penerimaan Tanggapan Masyarakat, Meskipun KPU sudah formal mengumumkan di koran atau website KPU perihal DCS dan DCT, tapi pengumuman DCS tersebut hanya dibaca consumer yang terbatas sehingga tidak efektif. Dalam verifikasi persyaratan administrasi dokumen persyaratan Partai Politik, aspek transparansi juga berkaitan erat dengan kemampuan KPU untuk menjelaskan apa yang sedang dikerjakan KPU atau mengapa KPU tidak mengerjakan sesuatu dalam proses verifikasi administrasi persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu serta bertanggung jawab secara vertikal kepada Pemerintah dan Pemilih serta kepada partai politik peserta Pemilu dan bakal calon anggota legislatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran KPU Kota Batu dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak tanpa kecurangan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam verifikasi administrasi, seperti kesulitan dalam memastikan keabsahan dokumen yang diunggah ke SIPOL akibat dokumen yang tidak terbaca jelas, dan kesulitan anggota partai politik dalam menggunakan aplikasi tersebut, diperparah dengan pergantian Liaison Officer (LO) yang menghambat proses verifikasi.

SARAN

Bahwa agar KPU selaku penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan tahapan verifikasi, baik dalam hal verifikasi dokumen maupun verifikasi berdasarkan fakta, langkah ini diambil dengan tujuan mewujudkan proses Pemilihan yang integritasnya terjamin, adil, dan memiliki kualitas yang lebih baik dan Partai politik harus meningkatkan pendidikan politik dalam proses kaderisasi mengingat terdapat kendala pada saat proses verifikasi berasal dari partai politik sehingga kedepannya dapat lebih mempersiapkan diri memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi calon peserta dalam Pemilu. pendidikan politik yang dimaksud dapat berupa pemahaman terhadap keanggotaan agar menghindari kegandaan anggot partai politik, dan tidak lagi melakukan tindakan hanya mengambil identitas seseorang agar terdaftar menjadi anggota partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman H. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Dedi, Agus. "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia." MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 7, no. 1 (2021): 1–9.
- Hoffman, Robert. "Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019." Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2019).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Ifah, Noor, *Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Vol. 2, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Putra, Indra Madan, *Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum*, Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2019.
- Putri, Amalisya Aulia Putri, *Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik*, 2023.
- Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019
- Samsudin, S.Hut., *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2019
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. Syamsuddin,
- Yulyani, Dewi, Mitimagasi Masalah Verifikasi Parpol Di Provinsi Jawa Timur, Vol. 4 No. 1, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, November 2022.